



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Clarity in Transition**  
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

**Laporan Kinerja**  
KPKNL Samarinda  
**2025**

## DAFTAR ISI

Sambutan Kepala KPKNL Samarinda.....	4
Ikhtisar Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2025.....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	7
1. Tugas DJKN .....	7
2. Fungsi DJKN .....	7
3. Struktur Organisasi KPKNL .....	7
C. Peran Strategis .....	8
D. Sistematika Laporan .....	8
BAB II RENCANA KINERJA .....	9
A. Rencana Strategis .....	10
B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026.....	11
1. Kegiatan Strategis .....	11
2. Penyusunan Renja 2025.....	11
3. Penyusunan Renja Tahun 2026 .....	12
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	13
A. Capaian Kinerja .....	14
B. Realisasi Agenda Prioritas .....	17
C. Realisasi Anggaran .....	17
D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	18
E. Kinerja Lain-Lain .....	18
F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	18
BAB IV PENUTUP.....	19
LAMPIRAN.....	20



## Sambutan Kepala KPKNL Samarinda

### Refleksi Kinerja 2025: Kontribusi Nyata untuk Indonesia Maju

Para Pemangku Kepentingan,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam Sejahtera untuk kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam Kebajikan

Sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda telah membuktikan diri sebagai pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel, dengan kontribusi konkrit terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, KPKNL Samarinda merealisasikan Penerimaan Negara sebesar Rp23,562M atau 92,95% dari target. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa kerja keras dan komitmen kami sejalan dengan visi Kementerian Keuangan sebagai penggerak transformasi ekonomi nasional.

Di bidang pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Samarinda ikut serta dalam program prioritas nasional berupa sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah, pengukuran kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan, dan pengoptimalan pemanfaatan BMN dalam rangka mendukung Penerimaan Negara.

Di bidang pengurusan piutang negara, KPKNL Samarinda berperan optimal dalam akselerasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) debitur di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

Di bidang Penilaian, KPKNL Samarinda terus meningkatkan kompetensi pejabat fungsional penilai yang mampu menghadapi tekanan integritas dan risiko hukum yang tinggi, dalam mewujudkan *outcome* yang mendukung kebijakan pengelolaan aset negara yang lebih baik.

Di bidang lelang, KPKNL Samarinda terus melakukan penyempurnaan pelayanan lelang secara transparan dan akuntabel disertai peningkatan kemudahan dan layanan yang optimal bagi para pemangku kepentingan.

Kinerja solid ini diakui melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Samarinda Tahun 2025 sebesar 109,63 dengan predikat ISTIMEWA. Lebih dari itu, kepercayaan masyarakat



tercermin dari survei kepuasan pengguna layanan dengan indeks 4,70 (skala 5)—sebuah apresiasi yang sangat kami hargai.

Prestasi ini berdiri di atas pondasi yang kuat antara lain sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas, penerapan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, serta dukungan sistem informasi yang terintegrasi.

Sebagai penutup, capaian kinerja tahun 2025 ini bukanlah garis finis, melainkan landasan awal yang kokoh. Ini menjadi modal strategis untuk mendukung program prioritas nasional (Asta Cita) dan mengakselerasi perekonomian Indonesia yang stabil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Apresiasi tertinggi kepada seluruh jajaran KPKNL Samarinda yang telah berkinerja dengan baik dan selalu memegang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas, sehingga bisa menjaga akuntabilitas kinerja KPKNL Samarinda. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Kepala KPKNL Samarinda,



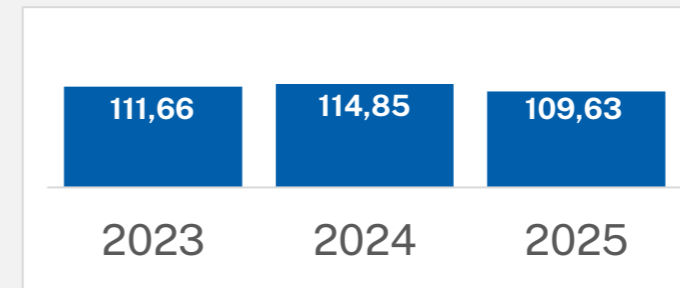
Ditandatangani secara elektronik  
Bagus Kurniawan

# Ikhtisar Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2025

## Nilai Kinerja Organisasi

**109,63** -5,22 points yoy

## Perbandingan NKO Tahun 2023 s.d. 2025




## Status IKU

- 18** IKU KPKNL Samarinda
- 16** IKU hijau
- 1** IKU kuning
- 1** IKU merah

## Kontribusi Tiap Perspektif





Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbangun sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

# 01.

## Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistematika Laporan

# A. Latar Belakang

Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah upaya peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Indikator peningkatan kinerja instansi Pemerintah dapat ditilik melalui ukuran pengelolaan keuangan yang sehat dan modern, pengukuran kinerja dengan indikator capaian, dan keterkaitan kegiatan dengan program instansi.

Dinamika organisasi merupakan salah satu faktor yang tak terelakkan dalam perkembangan pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring perkembangan teknologi serta digitalisasi, penyesuaian peta proses bisnis Kementerian Keuangan, dan arah kebijakan kelembagaan secara nasional, Kementerian Keuangan khususnya DJKN terus melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan kelembagaan. Penyesuaian organisasi pemerintah sesuai dengan peta proses bisnis tersebut dilakukan agar instansi DJKN mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan berdasarkan kebutuhan pelayanan di masa depan.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

# B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

## 1. Tugas DJKN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJKN mempunyai tugas:

**Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

## 2. Fungsi DJKN

- a) Perumusan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- b) Pelaksanaan kebijakan bidang kekayaan di negara, penilaian, dan lelang;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;

- d) Pemberian bimbingan teknis dan kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- e) Pelaksanaan analisis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- f) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

## 3. Struktur Organisasi KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. pelaksanaan pelayanan lelang
- g. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
- h. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Guna melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah dilakukan penataan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

### a. Subbagian Umum;

mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pehgadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

### b. Seksi Piutang Negara;

mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

### c. Seksi Hukum dan Informasi;

mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

### d. Seksi Kepatuhan Internal;

mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### e. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- 1) Jabatan Fungsional Penilai  
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian property dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan Fungsional Pelelang  
Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala KPKNL dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, empat Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional.



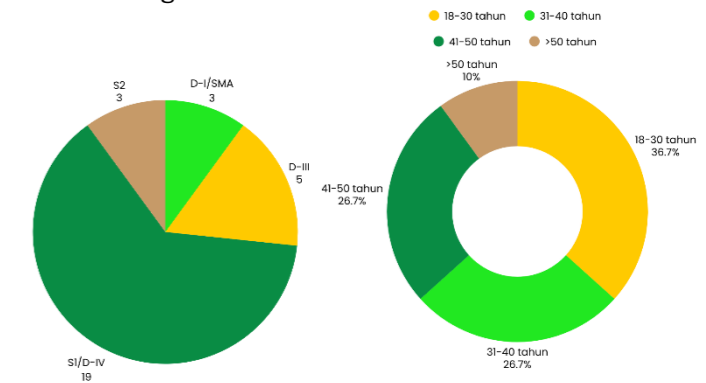
Gambar 1. Struktur Organisasi KPKNL

KPKNL Samarinda berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 6, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

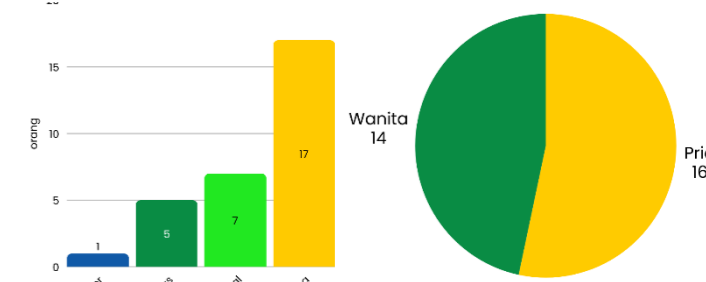


Gambar 2. Struktur Organisasi KPKNL Samarinda

Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), KPKNL Samarinda didukung oleh 30 orang pegawai dengan berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, hukum, keuangan, sosial, dan lain-lain. Komposisi pegawai KPKNL Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut.



Gambar 3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Usia



Gambar 4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

## C. Peran Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengelolaan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam melaksanakan implementasi kebijakan terkait bidang-bidang tersebut. Tugas dan fungsi tersebut merupakan sarana organisasi dalam menjalankan tugas yang diemban demi mewujudkan tujuan organisasi, sesuai dengan kerangka visi dan langkah misi organisasi DJKN. Lebih lanjut, tugas dan fungsi KPKNL Samarinda dijabarkan dalam peran strategis sebagai berikut.

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai instansi vertikal DJKN yang berperan dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara. Upaya optimalisasi antara lain dilakukan dengan cara pengelolaan kekayaan negara dengan baik, persertipikatan tanah Barang Milik Negara, pemanfaatan barang milik negara untuk peningkatan pendapatan negara berupa penerimaan negara bukan pajak, pemanfaatan barang milik negara untuk mendukung efisiensi belanja dan pemanfaatan aset negara untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kaitannya dengan fungsi DJKN sebagai asset manager, KPKNL Samarinda mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, serta penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan. KPKNL Samarinda berperan membantu satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga untuk menciptakan penatausahaan barang milik negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik dan tertib administrasi.

Untuk menuju optimalisasi tersebut KPKNL Samarinda berperan aktif dalam penertiban Barang Milik Negara (BMN) pada tiap satuan kerja (satker) dalam wilayah kerja dengan tujuan utama sebagai berikut:

- Melakukan pemutakhiran pembukuan BMN;
- Mewujudkan penatausahaan BMN di seluruh satuan kerja (satker) Pemerintah Pusat pada wilayah kerja KPKNL Samarinda; dan
- Melakukan tindak lanjut penatausahaan dan pengelolaan BMN yang tertib dan optimal.

Saat ini, peran KPKNL Samarinda menjadi semakin strategis dikarenakan sebagian wilayah kerja KPKNL Samarinda dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPKNL Samarinda dalam pengelolaan kekayaan negara. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Samarinda terus berupaya meningkatkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

### 2. Pelayanan Penilaian

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara

setelah dilakukan inventarisasi. Penilaian dilakukan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan BMN lain yang berada di lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi di bidang penilaian. Hasil penilaian kekayaan negara tersebut antara lain digunakan untuk penyusunan neraca pemerintah pusat, pemanfaatan, pemindahtanganan BMN, dan pengelolaan piutang negara (penilaian barang jaminan). Dengan demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *The Highest and Best Use*.

### 3. Pengurusan Piutang Negara

KPKNL Samarinda mempunyai peran yang strategis dalam pengurusan piutang negara. Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah pusat/daerah dan badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab lain yang sah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara semakin memperkuat peran dalam bidang pengurusan piutang negara melalui peran aktif dan sinergi antara DJKN dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan piutang negara.

KPKNL Samarinda juga berperan dalam pengelolaan piutang daerah melalui pengurusan berkas kasus piutang negara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Samarinda yaitu Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Melalui peran tersebut, KPKNL Samarinda telah berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui pengurusan piutang daerah dan memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### 4. Pelayanan Lelang

Pelayanan Lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Secara istilah, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului adanya Pengumuman Lelang. Selain itu, lelang merupakan bentuk pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah dilekatkan hak tanggungan dan eksekusi terhadap putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas. KPKNL Samarinda dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat selalu mengutamakan pelaksanaan

lelang yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan efisien. Diharapkan dengan semakin berkembangnya teknologi, khususnya terkait pengembangan *e-auction* dan platform marketplace *auction*, lelang dapat menjadi sarana transaksi pilihan masyarakat serta dapat berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

### 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPKNL Samarinda berkontribusi dalam penerimaan negara yang berasal dari:

- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat diperoleh melalui:
  - PNBP dari pengelolaan BMN yang berasal dari pemanfaatan sewa, pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang;
  - PNBP dari pelayanan lelang berupa bea lelang dan bea permohonan lelang, hasil lelang pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang BMN yang telah dihapuskan, dan lelang barang rampasan untuk negara; dan
  - PNBP dari pengurusan piutang negara/daerah berupa biaya administrasi piutang negara.
- Penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan atas pelaksanaan lelang tanah dan/atau bangunan;
- Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) atas pelaksanaan lelang tanah dan/bangunan; dan
- Penerimaan negara yang berasal dari pengurusan piutang negara berupa pokok piutang.

### Isu Strategis

- Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
- Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
- DJKN sebagai 8aktor penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, hal ini terlihat dari pos terbesar dalam neraca berasal dari aset dan investasi pemerintah. Proses penyajian nilai aset juga menjadi kontribusi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah.
- DJKN memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, melalui perencanaan, pengawasan, dan pengendalian investasi pemerintah pada BUMN.
- Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) yang berada di wilayah Kalimantan Timur memerlukan peran aktif dan kontribusi dari KPKNL Samarinda untuk menyukseskan program pemerintah melalui tugas dan fungsi DJKN serta aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait.
- KPKNL Samarinda selalu menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah di wilayah kerja, melalui asistensi pengelolaan barang milik daerah, penilaian, pengurusan piutang daerah dan pelaksanaan lelang.

### Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Samarinda pada Tahun 2025 yaitu:

- Kondisi ekonomi masih lemah sehingga daya beli

masyarakat rendah sehingga menjadikan pelaksanaan lelang tidak ada penawaran (TAP).

- Terdapat pemohon lelang dan calon peminat atau pembeli lelang yang belum memahami prosedur pelaksanaan lelang pada website lelang.go.id.
- Terdapat objek lelang yang batal dilaksanakan lelang karena SKPT tidak terbit.
- Implementasi SIMAN V2 pada seluruh Kementerian/Lembaga memerlukan waktu untuk penyesuaian.
- Terdapat persetujuan pengelolaan BMN yang sampai batas akhir pembayaran belum ditindaklanjuti oleh Pemohon.
- Sertipikasi KKKS terkendala dokumen yang tidak lengkap.
- Mekanisme Sertipikasi BMN melalui jalur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dapat dimonitor oleh KPKNL.
- Adanya tanah yang masuk Kawasan wilayah hutan yang menyebabkan hasil pengukuran berubah.
- Objek Penilaian berada di lokasi yang sulit untuk dijangkau.
- Debitur tanpa jaminan yang mengakibatkan tahapan pengurusan piutang negara hanya sampai pada penyampaian Surat Paksa.
- Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap gratifikasi.

## D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

### Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, isu strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi organisasi.

### Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan perkembangan implementasi pengelolaan kinerja.


### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi, dan realisasi anggaran.

### Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, langkah-langkah atau strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.





Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

# 02.

## Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan tahun 2026
- C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025

## A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Renstra DJKN Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran DJKN dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Aspek yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra 2025-2029 antara lain adalah perkembangan perekonomian global dan domestik terkini dan capaian Renstra pada periode sebelumnya. Ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan pada perekonomian nasional patut diwaspadai berpengaruh pada penerimaan negara bukan pajak dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Selanjutnya, dampak perubahan iklim global juga meningkatkan kejadian bencana alam seperti gempa, banjir, dan longsor yang memberikan dampak negatif pada perekonomian dan memunculkan risiko kerusakan infrastruktur Barang Milik Negara (BMN), sehingga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra DJKN.

Selain itu, penyusunan Renstra DJKN juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra DJKN diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian, khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, DJKN sebagai Pengelola Barang dituntut untuk mampu mengelola kekayaan negara secara optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kekayaan negara dikelola optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan efisiensi anggaran, mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tentunya memberikan manfaat dan dampak sosial bagi masyarakat. Selain itu, DJKN harus mampu menekan dampak kerugian keuangan negara akibat bencana yang menyebabkan kerusakan BMN melalui penerapan kebijakan pengasuransian BMN yang efektif. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Renstra DJKN Tahun 2025-2029 telah merumuskan strategi-strategi pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan DJKN dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja dan target pada Renstra DJKN dirumuskan sesuai dengan mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Renstra Kemenkeu 2025-2029 untuk memastikan bahwa kinerja DJKN mendukung arah kebijakan pada tingkat nasional dan Kemenkeu. Target pada indikator kinerja ditetapkan lebih menantang namun tetap realistis dengan mempertimbangkan kondisi terkini yang diperkirakan akan berdampak pada realisasi target.

KPKNL Samarinda senantiasa berupaya memberikan pelayanan di barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, piutang negara, kekayaan negara lain-lain, penilaian, dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini sesuai dengan visi DJKN yaitu “**Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan**”.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 4 (empat) misi, yaitu:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advorisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial;
2. Layanan penilaian dan advorisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum; dan
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan

layanan prima.

Dalam rangka mendukung pencapaian empat tujuan DJKN, ditetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh DJKN sebagai berikut.

- a. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, tertuang dalam sasaran strategis sebagai berikut:
- b. Layanan penilaian dan advorisi yang profesional dan relevan;
- c. Layanan lelang yang modern dan terpercaya; dan
- d. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Selanjutnya, sebagai salah satu instansi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Samarinda memiliki peran strategis dalam rangka mencapai tujuan yang kemudian dituangkan dalam 8 (delapan) sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
- 2) Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal;
- 3) Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa;
- 4) Penerapan tata kelola aset yang efektif; dan
- 5) Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif.
- 6) Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
- 7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif; dan
- 8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif.

Selain Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kemenkeu, untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi DJKN, juga ditetapkan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi tersebut adalah sebagai berikut.

### Tujuan 1 : Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional.
  - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan BMN berupa tanah.
  - b. Penguatan pengawasan dan pengendalian BMN melalui pembinaan dan tindak lanjut pengelolaan BMN.
  - c. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT) BMN.
  - d. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.
  - e. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.
  - f. Penguatan pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
  - g. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
  - h. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan

pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

- i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
  - j. Penguatan peran pengelolaan BMN dalam fiskal dan pembangunan nasional.
  - k. Penguatan kapasitas pembiayaan fiskal melalui penyediaan BMN sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
  - l. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.
2. Pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain yang akuntabel.
    - a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Kekayaan Negara Lain-lain.
    - b. Peningkatan kualitas data Kekayaan Negara Lain-lain melalui sistem yang terintegrasi.
    - c. Peningkatan tata kelola Kekayaan Negara Lain-lain melalui perbaikan regulasi.
  3. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional.
    - a. Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
    - b. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF).
    - c. Penguatan tata kelola dan dukungan pemerintah atas penugasan BUMN
    - d. Penguatan sinergi pengelolaan investasi pemerintah dengan BUMN/D, BPI Danantara, LPI/INA, dan pemerintah daerah serta negara lain/lembaga keuangan internasional
    - e. Penguatan fungsi advisory pengelolaan investasi pemerintah kepada pemerintah daerah dan BUMD dengan melibatkan kantor vertikal DJKN.
  4. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara.
    - a. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan piutang negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
    - b. Pengembangan sistem informasi di bidang piutang negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan piutang negara pada Kementerian/Lembaga.
    - c. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.
  5. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
    - a. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Daerah (BMD).
    - b. Pembentukan Asset Manager Forum (AMF) Regional/Nasional.

### Tujuan 2 : Layanan penilaian dan advorisi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan penguatan peran strategis layanan penilaian dan advorisi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah melalui Strategi berikut.

- a. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem/ESV sebagai bagian dari instrumen fiskal.
- b. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan aset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian/analisis bisnis.
- c. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advisori di bidang penilaian.
- d. Penguatan penilaian berbasis data dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- e. Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.

**Tujuan 3 : Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.**

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan dengan Arah Kebijakan layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional melalui Strategi berikut.

- a. Transformasi desain dan digitalisasi proses bisnis layanan lelang
- b. Implementasi layanan lelang melalui penyempurnaan platform lelang.
- c. Interkoneksi layanan lelang dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses bisnis lelang melalui kerja sama dengan mitra lelang.
- d. Partisipasi masyarakat melalui edukasi publik, perluasan akses pasar, dan, inklusifitas bagi pelaku ekonomi.
- e. Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
- f. Peningkatan kompetensi Pejabat Lelang melalui capacity building dan uji kualitas yang berkelanjutan.
- g. Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang.
- h. Pengembangan dan optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan aset
- i. Integrasi dan pemanfaatan geospasial dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi peserta lelang guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
- j. Optimalisasi peran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
- k. Peningkatan sinergi dan peran swasta dalam penyelenggaraan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.

**Tujuan 4 : Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.**

Pencapaian Sasaran Strategis ini dilakukan melalui Arah Kebijakan dan Strategi berikut.

- 1. Organisasi dan SDM yang optimal.
  - a. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.
  - b. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit.
  - c. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (Job Matching) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara.

- d. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan Assessment Center dan implementasi manajemen pengetahuan melalui dokumentasi tacit and explicit knowledge dan penguatan Community of Practice (CoP).
- e. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan negara.
- f. Pembentukan Human Capital Frame Work DJKN.
- g. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui simplifikasi, integrasi end-to-end, standarisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK.
- 2. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.
  - a. Pemutakhiran infrastruktur dan tata kelola TIK melalui penyusunan Grand Design Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN.
  - b. Simplifikasi, reengineering, dan integrasi sistem aplikasi DJKN.
  - c. Penguatan integritas data sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.
  - d. Implementasi data analitik dan Artificial Intelligence.
  - e. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan data security, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.
  - f. Pengukuran tingkat maturitas pengelolaan TIK DJKN.
- 3. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
  - a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala Risk Control Matrix seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait.
  - b. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

## B. Prioritas Nasional dan Penyusunan Renja Tahun 2025 dan Tahun 2026

### 1. Kegiatan Strategis

KPKNL Samarinda selaku Pengelola Kekayaan Negara mendukung Prioritas Nasional tahun 2025 melalui pelaksanaan Program Sertifikasi BMN Berupa Tanah.

Sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, salah satu lingkup dari pengelolaan BMN adalah pengamanan dan pemeliharaan yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Salah satu bentuk pengamanan hukum dalam pengelolaan BMN khususnya

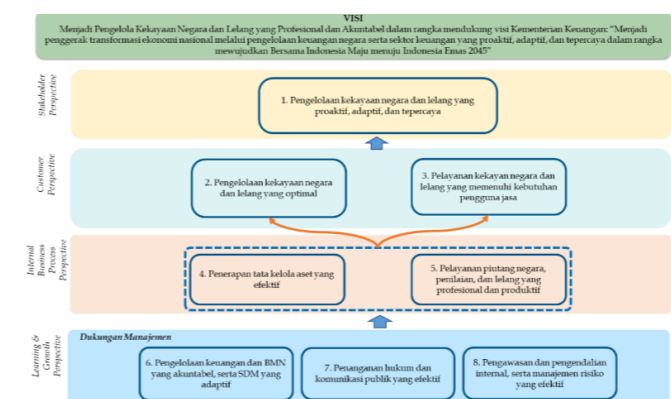
tanah adalah kegiatan melengkapi bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga dapat disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Bukti kepemilikan juga menjadi salah satu indikator baiknya pelaksanaan penatausahaan BMN. Dalam paragraf 21 Pernyataan Nomor 7 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis *Cash Towards Accrual* (CTA) dan *paragraph* 19 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dinyatakan bahwa saat pengakuan aset akan dapat lebih diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan.

### 2. Penyusunan Renja 2025

Dengan adanya penataan organisasi sebagai salah satu pilar dalam reformasi birokrasi, diharapkan bahwa pencapaian target penerimaan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk mendukung hal tersebut, setiap kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diinstruksikan untuk menetapkan indikator dan target kinerja yang menjelaskan keberhasilan pencapaian kinerja baik berupa hasil (*output*) maupun manfaat (*outcome*). Penetapan indikator dan target kinerja tersebut dikenal sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perencanaan kinerja merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dengan tetap menjaga integritas dan mempersembahkan kinerja terbaik di lingkungan instansi tersebut berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, KPKNL Samarinda mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN dan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN yaitu, "**Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.**"



Gambar 5. Peta Strategi Tahun 2025

Melalui Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2025 di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan mencapai 8 (delapan) Sasaran Strategis dan dituangkan dalam 18 (delapan belas) IKU yang ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja KPKNL Samarinda Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor

Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara dan Kepala KPKNL Samarinda.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut.

### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Indikator Kinerja		Target
1a-CP	Indeks Integritas	100
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp25,3M)

### 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Indikator Kinerja		Target
2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp315,7M)
2c-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100% (Rp541jt)

### 3. Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Indikator Kinerja		Target
3a-CP	Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi	74
3b-N	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77

### 4. Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif

Indikator Kinerja		Target
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
4b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%

### 5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif

Indikator Kinerja		Target
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%

### 6. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, Serta SDM yang Adaptif

Indikator Kinerja		Target
6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100
6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100
6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%

### 7. Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Indikator Kinerja		Target
7a-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100
7b-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PIP)	80

### 8. Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif

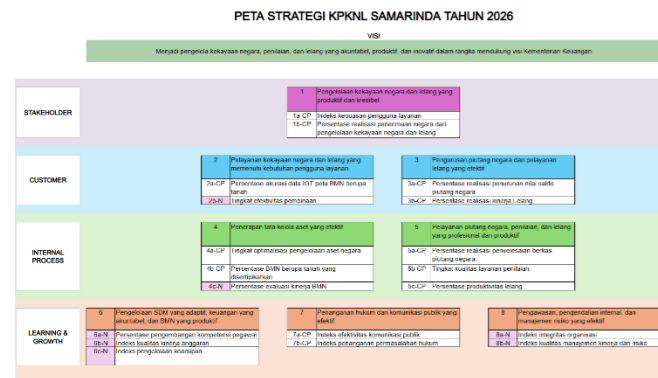
Indikator Kinerja		Target
8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80

Seiring berjalannya tahun 2025, telah dilakukan adendum Perjanjian Kinerja KPKNL Samarinda sesuai dengan Adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-02A/WKN.13/2025 tanggal 28 Oktober 2025, dengan rincian sebagai berikut.

- Melakukan perubahan target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara dari yang semula sebesar Rp541juta menjadi Rp1,087M.

### 3. Penyusunan Renja Tahun 2026

Langkah awal proses penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2026 diawali dengan pelaksanaan *refinement* Perjanjian Kinerja Tahun yang dilakukan secara paralel dengan *refinement* Piagam Manajemen Risiko. Proses *refinement* dilakukan dengan reviu atas peta strategi, IKU dan profil risiko tahun 2025 yang menghasilkan beberapa poin perbaikan yang dituangkan dalam konsep peta strategi tahun 2026. Pembahasan *refinement* dilakukan secara berjenjang mulai dari PK *Three* hingga PK *One* DJKN dengan melibatkan seluruh pejabat pengawas, administrator, pejabat tinggi pratama hingga Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Hal ini menunjukkan tingginya komitmen tiap level di dalam proses *refinement* untuk menyusun IKU dan target IKU yang berkualitas.



Gambar 6. Peta Strategi Tahun 2026

Berdasarkan Peta Strategi KPKNL Samarinda Tahun 2026 tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) sasaran strategis yang dikembangkan melalui 19 (sembilan belas) IKU.

Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel berikut:

#### 1. Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Produktif Dan Kredibel

Indikator Kinerja Utama		Target
1a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	100
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	100%

#### 2. Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan

Indikator Kinerja Utama		Target
2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN	100%

2b-N	Berupa Tanah Tingkat Efektivitas Pembinaan	80%
------	--	-----

#### 3. Pengurusan Piutang Negara Dan Pelayanan Lelang Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Target
3a-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%
3b-CP	Persentase Realisasi Kinerja Lelang	100%

#### 4. Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Target
4a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%
4b-CP	Persentase BMN Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%

#### 5. Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif

Indikator Kinerja Utama		Target
5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	100%
5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	80%
5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	85%

#### 6. Pengelolaan SDM Yang Adaptif, Keuangan Yang Akuntabel, Dan BMN Yang Produktif

Indikator Kinerja Utama		Target
6a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

#### 7. Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Target
7a-CP	Indeks Efektivitas Komunikasi Publik	80
7b-CP	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	80

#### 8. Pengawasan, Pengendalian Internal, Dan Manajemen Risiko Yang Efektif

Indikator Kinerja Utama		Target
8a-N	Indeks Integritas Organisasi	100
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	83

non operasional seperti untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penyediaan sarana prasarana. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung seluruh program dan kegiatan Prioritas Nasional dan Prioritas lainnya. Adapun rincian Pagu Anggaran tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Program/Kegiatan	Anggaran*
<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp381.737.000</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp32.569.000
2. Pengelolaan Aset	Rp349.168.000
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.884.909.000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp19.571.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.812.250.000
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp27.792.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp25.296.000

\*Pagu revisi per 12 Desember 2025

## C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Di dalam DIPA DJKN tahun 2025, anggaran KPKNL Samarinda dialokasikan sebesar Rp2,266M, antara lain untuk kebutuhan belanja operasional seperti pemeliharaan aset, kebutuhan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, dan belanja



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.

# 03.

## Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Agenda Prioritas
- C. Realisasi Anggaran
- D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain
- F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

# A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Samarinda adalah sebesar 109,63.

Tahun 2025, KPKNL Samarinda memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 18 (delapan belas) IKU, mencapai kinerja yang sangat baik, setelah mengerahkan segala daya dan upaya. Pencapaian ini berhasil diwujudkan berkat kerja keras para pegawai, sinergi antar bidang serta kebijakan pimpinan dalam merencanakan, mengusahakan dan merealisasikan target yang dibebankan KPKNL Samarinda. NKO tersebut diwujudkan melalui capaian 16 (enam belas) IKU dengan status hijau, 1 (satu) IKU berstatus kuning, dan 1 (satu) berstatus merah.

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 18 (delapan belas) IKU PK KPKNL Samarinda Tahun 2025 diperoleh hasil analisis atas pencapaian IKU sebagai berikut:

## 1) (1a-CP) Indeks Integritas

IKU ini bertujuan untuk memastikan peningkatan budaya integritas di seluruh organisasi Kementerian Keuangan. Pada kantor vertikal DJKN, IKU ini dinilai dari Persentase Tindak Lanjut Rencana Aksi Hasil SPI tahun 2024 (target 100% periode Q1-Q4). Dalam pencapaian IKU ini, KPKNL Samarinda telah melaksanakan secara tuntas (100%) Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2024. Adapun realisasi pada *trajectory* Q4 2025 merupakan Indeks Integritas hasil SPI 2025 yang dilakukan secara sampling pada unit vertikal DJKN. Dalam hal ini KPKNL Samarinda tidak menjadi sampel SPI, tetapi hasil tersebut akan menjadi realisasi secara nasional.

IKU	Peningkatan Indeks Integritas							
	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Realisasi
Target	100	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100

Realisasi dari IKU ini adalah sebesar 94,12 dengan indeks capaian sebesar 105,32. KPKNL Samarinda berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna jasa sehingga diharapkan dapat menyumbang kenaikan capaian indeks integritas secara nasional di tahun 2026 dari capaian tahun ini. Selanjutnya, KPKNL akan melaksanakan Rencana Aksi Tindak Lanjut SPI Tahun 2025.

## 2) (1b-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan

peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Pelayanan Lelang.

IKU	Penerimaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Realisasi
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	136,55%	112,75%	112,75%	91,38%	91,38%	92,95%	92,95%	92,95%
Capaian	100	100	100	91	91	93	93	93

Target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp25.349.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.562.822.594,26 (92,95%). Adapun rincian realisasi adalah sebagai berikut:

### 1) PNBPN Pengelolaan BMN

PNBPN Pengelolaan BMN terdiri atas:

- penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh KPKNL Samarinda;
- penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh KPKNL Samarinda;

dengan ketentuan telah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan.

Berdasarkan target PNBPN Pengelolaan BMN KPKNL Samarinda sebesar Rp16.237.000.000 telah berhasil tercapai sebesar Rp17.085.888.921 (105,23%). Capaian tersebut didominasi oleh PNBPN dari Pendapatan BLU lainnya sebesar 61,66%, dan Pendapatan Sewa sebesar 11,76%, Penjualan BMN sebesar 14,33%, serta Penjualan Barang Rampasan sebesar 12,25%. Terdapat penurunan PNBPN dari Pengelolaan BMN yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, sebesar Rp2.661.774.236.

Pada tahun 2025, likuidasi satuan kerja terdampak KMP terutama untuk satuan kerja yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian PUPR menyebabkan satuan kerja tidak dapat mengajukan pengelolaan BMN terutama Pemanfaatan berupa Sewa, sehingga tidak ada penerimaan dari Sewa BMN oleh satuan kerja pada K/L terkait. Untuk Tahun 2026, KPKNL Samarinda akan fokus melakukan penggalan potensi terutama pada satuan kerja terdampak likuidasi.

### 2) PNBPN Piutang Negara

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Dengan target sebesar Rp18.000.000, KPKNL Samarinda berhasil merealisasikan nilai biad PN sebesar Rp58.838.723,26 (326,88%). Pencapaian yang signifikan ini merupakan hasil upaya penagihan dan pendekatan yang dilakukan oleh Tim KPKNL Samarinda terhadap para debitur. Ke depannya, kami melakukan pemberitahuan/ *reminder* melalui media daring (*WhatsApp*) setiap awal bulan secara lebih rutin serta melakukan pemblokiran barang jaminan.

### 3) PNBPN Lelang

PNBPN Lelang berasal dari pelayanan lelang yang diupayakan oleh KPKNL berupa:

- bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh PL II dan Pegadaian;
- bea lelang batal atas permintaan penjual;
- biaya permohonan lelang;
- denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh PL Kelas II/Balai Lelang;
- uang jaminan pembeli wanprestasi;
- Perijinan Balai Lelang dan PL II;
- penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang;

Dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp9.094.200.000, KPKNL Samarinda dapat merealisasikan realisasi sebesar Rp6.418.094.950 (70,57%). Target penerimaan PNBPN Lelang ini belum dapat tercapai maksimal akibat kenaikan target yang dinilai cukup signifikan, sementara itu faktor pendukung seperti ketersediaan objek lelang, kondisi ekonomi, dan minat pasar di wilayah kerja KPKNL Samarinda yang berada di luar kendali. Kedepannya, KPKNL Samarinda akan mengawal penetapan target 2026 dan secara proaktif melakukan penggalan potensi lelang ke *stakeholder* lelang sejak awal tahun.

### 3) (2a-CP) Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

IKU	Tingkat optimalisasi penggunaan aset negara							
	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Realisasi
Target	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Realisasi	104,55%	101,21%	102,21%	106,39%	106,39%	102,79%	102,79%	102,79%
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100

IKU ini menghasilkan capaian yang berhasil melampaui targetnya (100%) yaitu sebesar 101,75%. Dalam rangka menggali dan mendorong tingkat optimalisasi aset BMN di wilayah kerja KPKNL Samarinda, kami telah menyampaikan surat kepada Satker terkait konfirmasi atas penggunaan/pemanfaatan BMN yang tingkat kesesuaian penggunaannya masih dibawah 50%. Namun, dari upaya tersebut hingga akhir tahun 2025 masih banyak Satker yang belum menindaklanjutinya. Selanjutnya, Tim KPKNL Samarinda akan berupaya mendorong satker agar melakukan pengelolaan BMN secara optimal melalui koordinasi yang bersifat formal maupun informal.

### 4) (2b-CP) Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu:

- Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan

sebagainya.

- Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBPN Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang. IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi kontribusi lelang dalam perekonomian nasional.

Target *Raw* Pokok Lelang KPKNL Samarinda Tahun 2026:  
 Lelang PL I : Rp186.000.000.000  
 Lelang Pegadaian : Rp129.710.000.000  
**Total Target Raw : Rp315.710.000.000**

IKU	Peningkatan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Realisasi
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	241,03%	105,19%	105,19%	76,59%	76,59%	71,65%	71,65%	71,65%
Capaian	100	100	100	76	76	71	71	71

Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Pelelang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp91.458.867.113 (49,17%) dari target sebesar Rp186M, sedangkan untuk realisasi pokok lelang pegadaian adalah sebesar Rp134.738.858.300 (103,88%) dari target sebesar Rp129.710.000.000. Total realisasi pokok lelang adalah sebesar Rp226.197.725.413 atau sebesar 71,65% dari target total sebesar Rp315.710.000.000.

Tidak tercapainya IKU ini sejalan dengan kendala pada IKU PNBPN lelang, yaitu penetapan target 2025 yang belum sepenuhnya berbasis data historis dan kapasitas riil unit kerja. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Tim PL KPKNL Samarinda akan berkoordinasi lebih awal dalam penetapan target tahun 2026 yang lebih realistis dan selaras dengan kapasitas riil. Selain itu, untuk memitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan lelang KPKNL Samarinda akan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penelitian dokumen secara cermat, penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait, serta konsultasi internal.

### 5) (2C-CP) Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara

yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 j.s. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

- 1) PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 2) Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 3) Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 4) PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
- 5) Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari:

- a. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
- b. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (debt to asset swap);
- c. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

KPKNL Samarinda	SS 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal							
	3a-CP Persentase realisasi penarikan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	1-25	Max/TPK
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	(Rp)54,1 Ji	(Rp)216,4 Ji	(Rp)405,75 Ji	(Rp)405,75 Ji	(Rp)1.087,087 M	(Rp)1.087,087 M	(Rp)1.087,087 M	(Rp)1.087,087 M
Capaian	54,1%	216,4%	405,75%	405,75%	108,7087%	108,7087%	108,7087%	108,7087%

Realisasi penurunan nilai outstanding piutang negara pada tahun 2025 adalah sebesar 136,26% atau Rp1.482.274.716,97 dari target sebesar Rp1.087.840.000,00. Pemerintah Pusat berkontribusi sebesar Rp885.624.239 (59,73%), Pemerintah Daerah berkontribusi sebesar Rp400.669.344 (27,03%), dan Lembaga sui generis berkontribusi sebesar Rp195.981.133 (13,22%).

Hingga saat ini, kendala dalam pencapaian IKU ini diakibatkan oleh keterbatasan petugas dalam berkomunikasi dengan debitur akibat tidak tersedianya kontak debitur yang bisa dihubungi dan surat peringatan yang tidak mendapat respon. Kedepannya, Tim KPKNL Samarinda akan melakukan pemberitahuan secara rutin setiap awal bulan dalam rangka penagihan dan pemblokiran Barang Jaminan.

**6) (3a-CP) Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi**

IKU ini mengukur tingkat keberhasilan penyampaian pesan kebijakan kekayaan negara (seperti lelang, piutang negara, dan pemanfaatan BMN) kepada *stakeholders*. Tujuan dari IKU ini adalah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas layanan.

Sejalan dengan IKU ini, KPKNL Samarinda telah melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan edukasi kepada pemangku kepentingan, di

antaranya:

1. Asset Talk 2025: Rangkaian kegiatan edukasi selama tiga hari (19–21 November 2025) yang membahas isu terkini penilaian aset, lelang, dan piutang negara.
2. Edukasi Lelang UMKM: Sosialisasi masif di ruang publik seperti *Sunday Morning*) dan kolaborasi dengan perbankan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pembelian melalui [lelang.go.id](http://lelang.go.id).
3. Secara konsisten melakukan amplifikasi konten media sosial terkait tugas, fungsi, dan pokok DJKN.

Pada tahun ini capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

KPKNL Samarinda	SS 2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-CP Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	1-25	Max/TPK
Target	74	74	74	74	74	74	74	74
Realisasi	92,45	98,22	100	110,81	93,78	106,55		
Capaian	125	133	135	150	127	145		

KPKNL Samarinda	SS 2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3c-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi (IKESLI ANG)							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	1-25	Max/TPK
Target	74	74	74	74	74	74	74	74
Realisasi	97,10	98,99	98,99	98,69	96,19	96,07		
Capaian	131	135	135	133	130	130		

Indikator IKU ini terdiri atas dua komponen, antara lain:

**1) Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang**

Sejak diberlakukannya [lelang.go.id](http://lelang.go.id) versi 2, para pemohon lelang mengalami kendala akibat perubahan aplikasi yang belum familiar, sehingga diperlukan strategi edukasi dan komunikasi yang lebih efektif. Sebelumnya tim KPKNL telah melaksanakan kegiatan edukom kepada PIC lelang Perbankan. Selanjutnya, kami akan menyusun agenda sosialisasi secara berkala dalam rangka meneruskan informasi terkini terkait aplikasi lelang pada grup *WhatsApp* PIC Lelang KPKNL Samarinda.

**2) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara**

Dalam hal menindaklanjuti kurangnya edukasi terkait pengurusan Piutang Negara, Tim KPKNL Samarinda telah melaksanakan kegiatan edukom kepada *stakeholder*. Kedepannya, diharapkan para *stakeholder* dapat menggali potensi BKPN pada unit masing-masing dan menyerahkannya kepada KPKNL Samarinda.

Rata-rata tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang adalah 106,56, sedangkan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pengelolaan piutang negara adalah 98,07 sehingga capaian IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi adalah secara keseluruhan adalah sebesar 102,31. Kegiatan edukom kepada *stakeholder* akan dikemas dengan lebih efektif menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

**7) (3b-CP) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kemenkeu (IKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan KPKNL Samarinda kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholder*. IKPL menyajikan data dan informasi tentang tingkat kepuasan pengguna layanan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan Kemenkeu kepada pengguna layanan dan stakeholders.

KPKNL Samarinda	SS 2. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3c-CP Indeks kepuasan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	1-25	Max/TPK
Target	77	77	77	77	77	77	77	77
Realisasi	92,60	95,30	95,20	95,20	95,27	94	95,70	
Capaian	120	125	125	125	125	120	125	

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2025 adalah sebesar 95,70 dengan indeks capaian 120. Indeks ini diperoleh dari 51 orang responden yang menilai layanan selama triwulan IV 2025.

Sebagai bentuk rencana aksi kedepannya, KPKNL Samarinda akan melaksanakan kegiatan berikut.

- 1) Penyusunan Laporan SKM TW IV 2025;
- 2) Pelaksanaan rencana tindak lanjut SKM TW IV 2025; dan
- 3) Penyebarluasan tautan pengisian SKM TW I 2026 kepada pengguna layanan

**8) (4a-CP) Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertipikatkan**

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan SHP harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. disamping itu Penggunaan Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

KPKNL Samarinda	SS 2. Pemanfaatan Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
	3a-CP Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	1-25	Max/TPK
Target	6%	40%	40%	60%	60%	60%	60%	60%
Realisasi	5,47%	45,33%	45,33%	81,55%	81,55%	105,82%	105,82%	105,82%
Capaian	91,17	113,33	113,33	135,92	135,92	176,37	176,37	176,37

Dari 439 bidang tanah yang menjadi target sertifikasi, Tim KPKNL Samarinda dapat merealisasikan sebanyak 465 bidang tanah disertipikasi. Beberapa isu utama terkait pencapaian IKU ini antara lain:

- a. Sertifikasi KKKS terkendala dokumen KKPR dan upaya pensertipikatan yang telah dilakukan belum optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan

khususnya pada KKKS:

- Pertamina Hulu Sangasanga (terbit SHP 6 bidang tanah);
- Pertamina EP Sangatta (s.d. Q4 berproses 2 dari 6 bidang tanah); dan
- Pertamina EP Sangasanga (s.d. Q4 belum selesai memasang patok batas).

- b. Sertifikasi satker PTJT Wilayah II s.d. Q4 telah dilakukan revisi perubahan target, finalisasi revisi sudah disampaikan oleh PIC pada Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara ke Kanwil ATR/BPN Prov. Kaltim (terbit 44 SHP).

Adapun pada Triwulan IV 2025, Tim KPKNL Samarinda telah melakukan serangkaian kegiatan sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut, antara lain:

- 1) Rapat Pendetailan dan Koordinasi Sertifikasi KKKS Periode September, Oktober, November, Desember;
- 2) Finalisasi penentuan titik batas terluar pada Oktober & November bersama pihak Kantor Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, Satuan Kerja PTJT Wilayah II, dan Perwakilan masyarakat setempat sebagai saksi ahli pada saat pembebasan; dan
- 3) Penelusuran terhadap 41 s.d. 45 bidang tanah yang berpotensi menjadi target pengganti pada Satker PTJT Wilayah II.

Terhadap kendala terkait target sertifikasi dari subordinasi yang belum sepenuhnya *clean and clear* tersebut, KPKNL Samarinda melakukan sinergi aktif dengan Kantah dan Satuan Kerja untuk melakukan percepatan sertifikasi BMN.

**9) (4b-CP) Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

Evaluasi kinerja BMN dilakukan terhadap seluruh aset pemerintah pusat. Namun demikian, berkaitan dengan banyaknya aset tersebut, kegiatan ini difokuskan pada BMN yang mempunyai nilai signifikan yaitu aset berupa tanah dan bangunan yang berada di pengelola barang dan pengguna barang.

Dalam evaluasi kinerja BMN, terdapat 6 indikator pengukuran yang digunakan, yaitu:

- 1) Indikator kepentingan umum. Indikator ini mengukur kepentingan orang banyak atau tujuan yang luas atas BMN yang dievaluasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, definisi dari kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu, aspek-aspek lain yang menjadi pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang termasuk kepentingan umum, antara lain: rahasia negara, alat utama sistem senjata, dan kawasan hutan.
- 2) Indikator Manfaat sosial. Indikator ini melihat seberapa besar manfaat sosial yang dirasakan atas BMN yang dievaluasi khususnya bagi masyarakat di sekitar lokasi tempat BMN berada. Indeks yang dapat digunakan untuk mengukur diantaranya adalah indeks kesejahteraan hidup penduduk melalui pengukuran indeks mutu hidup

(IMH) dan indeks pembangunan manusia (IPM). Selain itu tingkat kesejahteraan juga dapat digunakan untuk mengukur indikator manfaat sosial. tingkat kesejahteraan ini meliputi tiga indikator yaitu: jumlah dan pemerataan pendapatan, pendidikan yang sekain mudah dijangkau, dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata.

- 3) Indikator tingkat kepuasan stakeholder. Secara umum tingkat kepuasan ini dapat dilihat dari lima dimensi yaitu: kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan penampakan fisik (tangibles). Kepuasan ini dapat diidentifikasi dari persepsi stakeholder terhadap harapan yang telah terpenuhi atau terlampaui. Kepuasan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: fungsionalitas, fitur-fitur, keindahan desain, daya tahan, kemudahan mendapatkan layanan, kesesuaian, dan kualitas layanan.
- 4) Indikator potensi masa depan. Setiap aset khususnya gedung dan bangunan harus diklasifikasikan berdasarkan peran operasional dan tingkat kekritisan. Hal ini berguna untuk menetapkan prioritas alokasi sumber daya. Penilaian kekritisan ini mempertimbangkan dua hal, yaitu penting tidaknya aset untuk pemberian layanan inti kepada publik, dan konsekuensi dalam hal risiko terhadap kegagalan pemberian layanan dan kemudahan penggantian aset.
- 5) Indikator kelayakan finansial/ekonomi. Beberapa indikator pengukuran yang dapat dilakukan untuk aset yang bersifat profitable yaitu melalui penghitungan: *Gross rent multiplier (GRM)*, *Cash on cash return (CoCR)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate Return (IRR)*, *Debt Coverage ratio (DCR)*, *Break even ratio (BER)*, *Loan to value ratio (LoVR)*, tingkat kapitalisasi, *net cash flow* (arus kas bersih). Sedangkan untuk aset yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan, maka kinerja finansialnya dihitung dengan menghitung perbandingan total biaya perolehan baru, biaya operasional (listrik dan air), biaya pemeliharaan, dan besaran biaya penyusutan aset.
- 6) Indikator kondisi teknis. Kondisi teknis aset mencerminkan keadaan fisik aset. Umumnya hal ini dapat diukur dari sisi keandalan, ketersediaan, kapasitas, serta tuntutan dan kebutuhan pelanggan. Umumnya indikator ini diukur dengan melihat kondisi aset berdasarkan kondisinya (baik, rusak ringan, atau rusak berat).

Hasil akhir dari evaluasi kinerja BMN adalah nilai/skor dari masing-masing indikator pengukuran. Dimensi dari setiap indikator dapat dihitung dengan menggunakan metode dimensi rendah atau metode rata-rata. Hal ini tergantung dari kondisi dan objek BMN yang dievaluasi.

Output dari evaluasi kinerja BMN dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan pengelolaan BMN, dalam hal ini apakah BMN tersebut tetap dipelihara, dimanfaatkan, dipindahtanganan, atau justru dihapuskan. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan evaluasi kinerja BMN, akan dapat diketahui kinerja BMN tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan awal pengadaan/pembangunan.

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait asset performance measurement melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya.

KPKNL Samarinda	SS 4. 4a-CP	Pemeriksaan tata kelola aset yang efektif							Pagu/PP
		Persentase evaluasi kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK	
Target	50%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK	
Realisasi	10,78%	55,43%	55,43%	98,86%	98,86%	111,71%	111,71%	Progress	
Capaian	111,85	110,86	110,86	120	120	111,71	111,71		

Secara keseluruhan IKU ini tercapai sebesar 123,65%. IKU Persentase evaluasi kinerja BMN terdiri dari dua komponen, yaitu:

1. Persentase aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya dengan target 175 NUP dan realisasi 181 NUP sehingga capaiannya adalah 103,43% serta
2. Persentase rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker dengan target 9 dan realisasi 19 sehingga capaiannya adalah 120%.

Secara keseluruhan, capaian IKU Persentase evaluasi kinerja BMN adalah 111,71%.

Dalam pelaksanaannya kendala yang sering dihadapi Tim KPKNL Samarinda yaitu:

1. Lokasi aset/BMN yang lokasinya berjauhan atau tidak dalam satu kawasan sehingga mobilisasi menjadi rendah; dan
2. Penyusunan jadwal survei lapangan dengan satker sering terkendala.

Kedepannya, tim KPKNL akan melakukan survei lapangan maupun *on desk survei* untuk melengkapi target Evaluasi Kinerja Tahun 2025.

**10) (5a-CP) Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara**

IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPn dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPn diukur dengan penjumlahan:

- 1) BKPn lunas (SPPNL)
- 2) BKPn penarikan (SPPNS)
- 3) BKPn dikembalikan (SKPBN)
- 4) BKPn Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- 5) Koreksi data BKPn

KPKNL Samarinda	SS 5. 5a-CP	Pelayanan piutang negara, penitilan, dan lelang yang profesional dan produktif							Pagu/PP
		Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK	
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK	
Realisasi	115%	225%	225%	133,64%	133,64%	120,67%	120,67%	Progress	
Capaian	115	120	120	133	133	120	120		

Jumlah BKPn yang terselesaikan di tahun 2025 adalah sebanyak 16 berkas dari target 15 berkas, sehingga realisasi IKU tersebut tercapai hingga 120,67%. Empat berkas diterbitkan SPPNL, satu berkas diterbitkan SPPNS, sepuluh berkas diterbitkan PSBDT, dan satu berkas diterbitkan SKPPN.

Dalam pencapaiannya Tim KPKNL Samarinda kesulitan untuk berkomunikasi dengan debitur karena tidak terdapat kontak debitur yang bisa dihubungi dan surat peringatan yang telah disampaikan tidak mendapatkan respon.

**11) (5b-CP) Tingkat Kualitas Layanan Penilaian**

Penyelesaian layanan penilaian yang tepat waktu dapat mempercepat proses pemberian persetujuan bagi pengguna layanan yang berdampak pada optimalisasi PNPB. Tingkat kualitas layanan penilaian dihitung berdasarkan aspek norma waktu layanan (40%), akurasi data layanan (30%), dan nilai hasil kaji ulang (30%).

KPKNL Samarinda	SS 5. 5b-CP	Pelayanan piutang negara, penitilan, dan lelang yang profesional dan produktif							Pagu/PP
		Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK	
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max/TLK	
Realisasi	114,89%	112,83%	113,86%	108,29%	111,89%	111,32%	111,32%	Progress	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120		

Sepanjang tahun 2025, Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (JFPP) KPKNL Samarinda telah dihasilkan 30 laporan penilaian BMN. Laporan penilaian tersebut diperuntukkan untuk penyusunan LKPP, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Secara keseluruhan, realisasi Tingkat Kualitas Layanan Penilaian adalah sebesar 111,32%, dengan capaian IKU sebesar 120.

Kendala yang sering dihadapi saat ini yaitu Satker/Pemohon Penilaian belum menginput surat permohonan pada aplikasi SIP dan lokasi pemohon Penilaian yang cukup jauh, sehingga memakan waktu lebih lama di lapangan. Untuk mengatasi kendala tersebut JFPP akan melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pihak terkait untuk pemetaan objek penilaian, ketersediaan SDM dan sebaran lokasi penilaian. Selain itu, akan dilakukan monitoring kembali atas permohonan penilaian yang telah diinput pada aplikasi Satu Kemenkeu.

**12) (5c-CP) Persentase Produktivitas Lelang**

Pengelolaan lelang yang optimal adalah pelaksanaan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang) dan Pejabat Lelang Kelas II (target Kanwil). Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang. IKU agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU ini bertujuan agar lelang lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan dua komponen, yaitu realisasi komponen lelang laku dengan bobot 40% dan komponen frekuensi lelang bobot sebesar 60%.

KPKNL Samarinda	SS 5. 5c-CP	Pelayanan piutang negara, penitilan, dan lelang yang profesional dan produktif							Pagu/PP
		Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK	
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max/TLK	
Realisasi	47,83%	58,49%	58,49%	73,87%	73,87%	89,71%	89,71%	Progress	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120		

Sepanjang tahun 2025, terdapat 4 (empat) jenis lelang yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I.

Lelang tersebut meliputi, lelang non eksekusi sukarela, lelang non eksekusi wajib, lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi selain hak tanggungan. Jumlah realisasi frekuensi lelang yang telah dilaksanakan sebanyak 721 dari target 935 frekuensi. Secara keseluruhan, persentase produktivitas lelang terealisasi sebesar 86,71%.

Rencana aksi kedepannya, untuk semakin meningkatkan frekuensi lot lelang laku para Pejabat Lelang akan melakukan penggalian potensi lelang secara berkelanjutan, khususnya kepada *stakeholder* eksisting di lingkungan KPKNL Samarinda serta menjaga kualitas layanan dan ketepatan waktu pelaksanaan lelang.

**13) (6a-CP) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Implementasi IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran bertujuan untuk memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 sebagaimana diubah dengan PMK 107 Tahun 2024 p asal 249 ayat (7).

Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

KPKNL Samarinda	SS 6. 6a-CP	Pengalokasian keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang efektif							Pagu/PP
		Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Max/TLK	
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK	
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	Progress	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120		

Indeks Kualitas Kinerja Anggaran tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100. Beberapa tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

- 1) melaksanakan revisi anggaran secara responsif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 2) mengoptimalkan capaian output serta memperhatikan batas waktu pengisian pada Aplikasi SAKTI; dan
- 3) menjaga kualitas penyerapan anggaran, pelaksanaan rencana penarikan dana, dan tata kelola UP/TUP/SPM dengan melakukan monitoring secara mingguan.

**14) (6b-N) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa**

IKU ini mengukur komponen berikut:

- A. Kualitas Pengelolaan BMN
  - 1) Tingkat Kesesuaian SBSK+SSJ
  - 2) Tingkat Penerimaan PNPB
  - 3) Tingkat Penggunaan Aset Bersama
- B. Kualitas Pengelolaan Pengadaan
  - 1) Tingkat Kematangan UKPBJ
  - 2) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri

KPKNL Samarinda	SS 6. %/N	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akurat, serta SDM yang unggul							Pdt/PP
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
TRE	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa adalah sebesar 120 dari target 100. Pelaksanaan efisiensi anggaran pada tahun 2025 menyebabkan beberapa kali perubahan pada aplikasi PBJ *E-Prime*, sehingga capaian terhitung berlebihan. Maka dari itu, Tim KPKNL Samarinda segera melakukan input ulang pada aplikasi PBJ *E-Prime*. Berkaitan dengan dinamika belanja negara pada beberapa tahun ini, KPKNL Samarinda berupaya untuk memastikan pelaksanaan belanja anggaran tidak terkendala baik secara riil maupun aplikasi.

**15) (6c-N) Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. Pengukuran IKU ini berupa persentase banyaknya pegawai yang telah memenuhi standar minimal pengembangan kompetensi dalam satu tahun dan pengembangan kompetensi tersebut telah sesuai dengan perencanaan yang disusun di awal tahun. Pegawai telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 30 JP (jam pelatihan), minimal 1 dari usulan rencana pengembangan kompetensi pada Individual Development Plan (IDP) telah dilaksanakan, dan minimal 1 pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Standar jam pelatihan adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 30 jam pelatihan (JP). Bila dikonversi, 1 JP adalah 45 menit. Jenis pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada peraturan terkait pengembangan kompetensi pegawai yang tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perencanaan pengembangan kompetensi pegawai yang terdokumentasikan dalam Individual Development Plan (IDP) adalah usulan diklat/pelatihan yang disepakati oleh bawahan dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.

KPKNL Samarinda	SS 6. %/N	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akurat, serta SDM yang unggul							Pdt/PP
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
TRE	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	80%	Max/TLK
Target	20,4%	41,88%	41,88%	62,84%	62,84%	83,80%	83,80%	83,80%	
Realisasi	20,4%	41,88%	41,88%	62,84%	62,84%	83,80%	83,80%	83,80%	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai di lingkup KPKNL Samarinda adalah sebesar 97,20% dengan indeks capaian 120 jika dibandingkan dengan targetnya sebesar 80%. Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Samarinda telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) menghimbau seluruh pegawai untuk menyusun IDP dan melaksanakan IDP pada awal tahun sesuai penugasan pada masing-masing subbagian/seksi beserta pengembangan lainnya;
- 2) menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan pelatihan pada Aplikasi Diklat; dan
- 3) mengkoordinasikan bersama seluruh pegawai terkait pelaksanaan pembinaan mental setiap triwulan agar terlaksana sesuai dengan jadwal.

**16) (7a-CP) Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

Indeks penanganan permasalahan hukum merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan risiko hukum dan penyelesaian perkara terkait kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. KPKNL Samarinda senantiasa berupaya mengoptimalkan penyelesaian masalah hukum melalui peningkatan kualitas pendaptan hukum dan penanganan perkara, guna mendukung pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan akuntabel. Komponen pengukuran IKU ini antara lain:

- Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

KPKNL Samarinda	SS 7. %/N	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							Pdt/PP
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
TRE	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	118,09	118,29	118,29	117,32	117,32	118,09	118,09	118,09	
Capaian	118,09	118,29	118,29	117,32	117,32	118,09	118,09	118,09	

Realisasi indeks penanganan perkara di lingkungan KPKNL Samarinda adalah sebesar 118,09. Per 31 Desember 2025, terdapat 44 (empat puluh empat) perkara aktif di KPKNL Samarinda. 11 (sebelas) perkara dalam tahap pengadilan tingkat pertama, satu perkara di tingkat banding dan empat perkara di tingkat kasasi 2 (dua puluh sembilan) perkara. Adapun selama tahun 2025, terdapat 24 (dua puluh empat) perkara yang sudah putusan kasasi menang (incracht), 2 perkara yang dicabut, 1 penetapan gugur dan 1 perkara damai. KPKNL seringkali ditarik sebagai pelengkap para pihak supaya perkara tidak *error in persona*, namun terdapat potensi ikut kalah bersama Tergugat. Untuk mengantisipasi hal tersebut tim Hukum berupaya melakukan penanganan perkara semaksimal mungkin dengan menyusun bukti-bukti yang kuat.

Untuk memastikan penanganan perkara dapat berjalan dengan baik dan optimal, KPKNL Samarinda terus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Menyimpan dan mengarsipkan seluruh dokumen serta produk hukum terkait lelang dan piutang negara secara sistematis, agar siap digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
- 2) Menunjukkan komitmen dengan menghadiri seluruh agenda persidangan sesuai ketentuan, sebagai wujud itikad baik.
- 3) Meningkatkan kompetensi staf penanganan perkara melalui berbagai pelatihan, baik secara *e-learning* maupun pelatihan jarak jauh.
- 4) Membangun sinergi melalui koordinasi rutin dengan

Kanwil, Direktorat Hukum dan Humas, serta Biro Advokasi.

**17) (7b-N) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

IKU ini untuk mengukur ketepatan waktu pemberian layanan informasi publik pada Unit PPID Tk. III/KPKNL, ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan pengelolaan informasi/PPID serta penyediaan data/informasi serta merta, berkala, dan yang harus ada pada website DJKN/KPKNL.

KPKNL Samarinda	SS 7. %/N	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							Pdt/PP
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
TRE	100	100	100	100	100	100	100	100	Max/AVG
Target	100	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	115	110	112,50	116	113,67	116	114,25	114,25	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	

Sepanjang tahun 2025, terdapat 8 (delapan) permintaan informasi publik. Kebutuhan publik akan informasi yang cepat dan transparan cukup tinggi, sehingga perlu peningkatan kualitas konten informasi agar lebih mudah dipahami masyarakat. Tim Humas KPKNL Samarinda melakukan pengecekan setiap hari pada website PPID, agar permohonan dapat ditindaklanjuti pada kesempatan pertama. Secara keseluruhan realisasi IKU PPID ini adalah 114,25 dengan indeks capaian sebesar 120.

Tingkat literasi digital masyarakat yang beragam menyebabkan penyampaian informasi publik yang tidak kurang efektif. Rencana aksi KPKNL Samarinda kedepannya adalah:

- 1) berperan aktif dalam komunikasi publik sesuai strategi komunikasi;
- 2) menyampaikan laporan informasi publik secara tepat waktu; dan
- 3) melakukan pemutakhiran informasi publik pada website secara tepat waktu.

**18) (8a-N) Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko**

IKU ini memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko terdiri dari tiga komponen, yaitu kualitas manajemen kinerja pegawai, kualitas manajemen kinerja organisasi dan kualitas manajemen risiko.

KPKNL Samarinda	SS 8. %/N	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							Pdt/PP
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
TRE	80	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Target	94,54	97,31	97,31	98,15	98,15	97,29	97,29	97,29	
Realisasi	94,54	97,31	97,31	98,15	98,15	97,29	97,29	97,29	
Capaian	100	100	100	100	100	100	100	100	

Indeks Manajemen Kinerja dan Risiko di lingkup KPKNL Samarinda adalah sebesar 97,29 dengan indeks capaian 120. Pengelolaan manajemen kinerja dan risiko tersebut melalui rangkaian upaya sebagai berikut.

- 1) Pengelola kinerja mengikuti pelatihan terkait pengelolaan dan manajemen kinerja dan manajemen risiko
- 2) Pengelola kinerja dan risiko organisasi melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait dokumen-dokumen kinerja dan risiko organisasi guna memastikan seluruh data yang dibutuhkan untuk keperluan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko organisasi dapat terpenuhi secara lengkap dan tepat

waktu.  
3) Pengelola kinerja pegawai melakukan edukasi kinerja melalui sosialisasi/sharing knowledge dengan tema pengelolaan kinerja, eskalasi informasi melalui nota dinas, serta pembuatan infografis dan broadcast yang di edarkan melalui grup WhatsApp.

## B. Realisasi Agenda Prioritas

**Program Sertifikasi BMN Berupa Tanah**

Capaian bidang tanah yang terbit sertipikat (Kategori K1) pada tahun 2025 adalah sebanyak 87 bidang yang terdiri dari 76 bidang tanah BMN dan 11 bidang tanah KKKS. Adapun capaian total program Sertifikasi BMN (Kategori K1 s.d. K4) tahun 2025 adalah sebanyak 462 bidang yang terdiri dari 326 bidang tanah BMN dan 136 bidang tanah KKKS.

## C. Realisasi Anggaran

Dengan berakhirnya proses e-Rekon & Laporan Keuangan KPKNL Samarinda, berdasarkan data sampai dengan 31 Desember 2025 terhitung realisasi belanja unit KPKNL Samarinda pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.965.991.545 atau 99,30% dari total pagu di luar blokir dalam DIPA KPKNL Samarinda sebesar Rp1.979.772.000. Realisasi per jenis belanja dapat dijabarkan sebagai berikut.

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%Penyerapan
Belanja Barang	Rp1.923.772.000	Rp1.910.781.545	99,32
Belanja Modal	Rp56.000.000	Rp55.210.000	98,59
<b>Total</b>	<b>Rp1.979.772.000</b>	<b>Rp1.965.991.545</b>	<b>99,30</b>

Pada tahun anggaran 2025, KPKNL Samarinda melaksanakan 6 (enam) kegiatan oleh masing-masing subbagian/seksi dan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun rincian pagu dan realisasi penyerapan DIPA kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut.

Program/Kegiatan	Pagu Revisi	Realisasi
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp319.091.000</b>	<b>Rp312.052.182</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp4.744.000	Rp4.107.000
2. Pengelolaan Aset	Rp314.347.000	Rp307.945.182
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp1.660.681.000</b>	<b>Rp1.653.939.363</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp14.571.000	Rp12.767.500
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1.632.938.000	Rp1.629.771.863
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp5.468.000	Rp4.000.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp7.704.000	Rp7.400.000

\*Penyerapan per 31 Desember 2025

## D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### Efisiensi Anggaran

Sehubungan dengan pelaksanaan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025, KPKNL Samarinda menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp286.874.000. Adapun efisiensi tersebut ditujukan untuk mendukung belanja Pemerintah yang menjadi prioritas Presiden untuk mendorong peningkatan produktivitas, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

## E. Kinerja Lain-Lain

### 1. Penghargaan Mahakam Treasury Award

Pada Tahun 2025, KPKNL Samarinda berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang *Mahakam Treasury Award* Semester Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda. Dalam acara tersebut, KPKNL Samarinda meraih dua penghargaan sekaligus, yakni sebagai Satuan Kerja Terbaik penerima "Mahakan Treasury dan Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Satu Terbaik Periode Tahun Anggaran 2025.

### 2. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

KPKNL Samarinda memperoleh penghargaan Nagara Dana Abyakta yaitu sebagai Unit Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPANRB). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Keuangan pada Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke 80 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Keuangan.

Pelayanan publik ramah kelompok rentan adalah bentuk pelayanan publik yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penghargaan ini tidak lepas dari upaya dan komitmen KPKNL Samarinda untuk terus meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada Kelompok Rentan.

### 3. Penghargaan Atas Dedikasi dan Komitmen Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

KPKNL Samarinda memperoleh penghargaan atas


dedikasi dan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Penghargaan tersebut diberikan oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Samarinda. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Seminar Parenting yang bertajuk "*Menjadi Pilar Kuat Membangun Mental Orang Tua Anak Untuk Anak Berkebutuhan Khusus*" yang diselenggarakan oleh PPDI Kota Samarinda di Aula Mahakam, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Kegiatan diikuti oleh para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini bertujuan memberikan dukungan psikologis, pengetahuan, serta pemahaman yang komprehensif terkait peran orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Melalui kegiatan tersebut diharapkan sinergi antara pengguna layanan inklusif dengan KPKNL Samarinda terjalin dengan baik sehingga bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

## F. Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka evaluasi dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, KPKNL Samarinda melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi secara berkala setiap triwulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor selaku Pemegang Peta Strategis KPKNL Samarinda.

Tidak hanya tingkat organisasi, evaluasi individu juga dilaksanakan oleh masing-masing atasan langsung melalui Dialog Kinerja Individu yang dilaksanakan setiap bulan melalui mekanisme *Coaching*, *Mentoring* dan atau *Conselling* kepada staf/bawahan langsung, untuk mencapai tujuan kinerja masing-masing pegawai.





Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

04.

Penutup

## Penutup

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPKNL Samarinda, dapat disimpulkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2025 adalah 109,62. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencapaian kinerja KPKNL Samarinda tahun 2025 secara rata-rata telah melampaui indeks yang ditetapkan. Dengan tercapainya realisasi *stakeholder perspective* tercapai sebesar 100,06 dapat diartikan bahwa tujuan utama organisasi terutama dalam peningkatan kontribusi kekayaan negara dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, sejalan dengan capaian *customer perspective* tercapai sebesar 107,83 dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa yang berpengaruh pada kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Demikian pula dengan realisasi *internal process perspective* sebesar 112,47 dan *learning & growth perspective* sebesar 119,68, menandakan bahwa proses investasi yang berupa peningkatan SDM, anggaran yang maksimal, serta pelaksanaan proses organisasi sesuai dengan aturan yang berlaku telah mendukung keberhasilan tujuan organisasi.

Langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan KPKNL Samarinda dalam meningkatkan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan adalah dengan melanjutkan sinergi dan koordinasi dengan DJKN Pusat, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, dan seluruh stakeholder baik instansi pemerintah pusat/daerah, perbankan, UMKM, dan masyarakat. Di samping itu, KPKNL Samarinda akan melanjutkan penggalian potensi PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang melalui monitoring dan evaluasi langsung dengan kunjungan ke lapangan maupun tidak langsung melalui aplikasi pendukung dan persuratan dengan tindak lanjut penyampaian rekomendasi tindak lanjut melalui surat dinas maupun kunjungan ke lapangan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang terhadap perekonomian yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini, kami harapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Samarinda, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja (LKj) tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi. Secara eksternal, Laporan Kinerja (LKj) harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholder. Dengan demikian pada akhirnya DJKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan yang profesional.



**Lampiran**





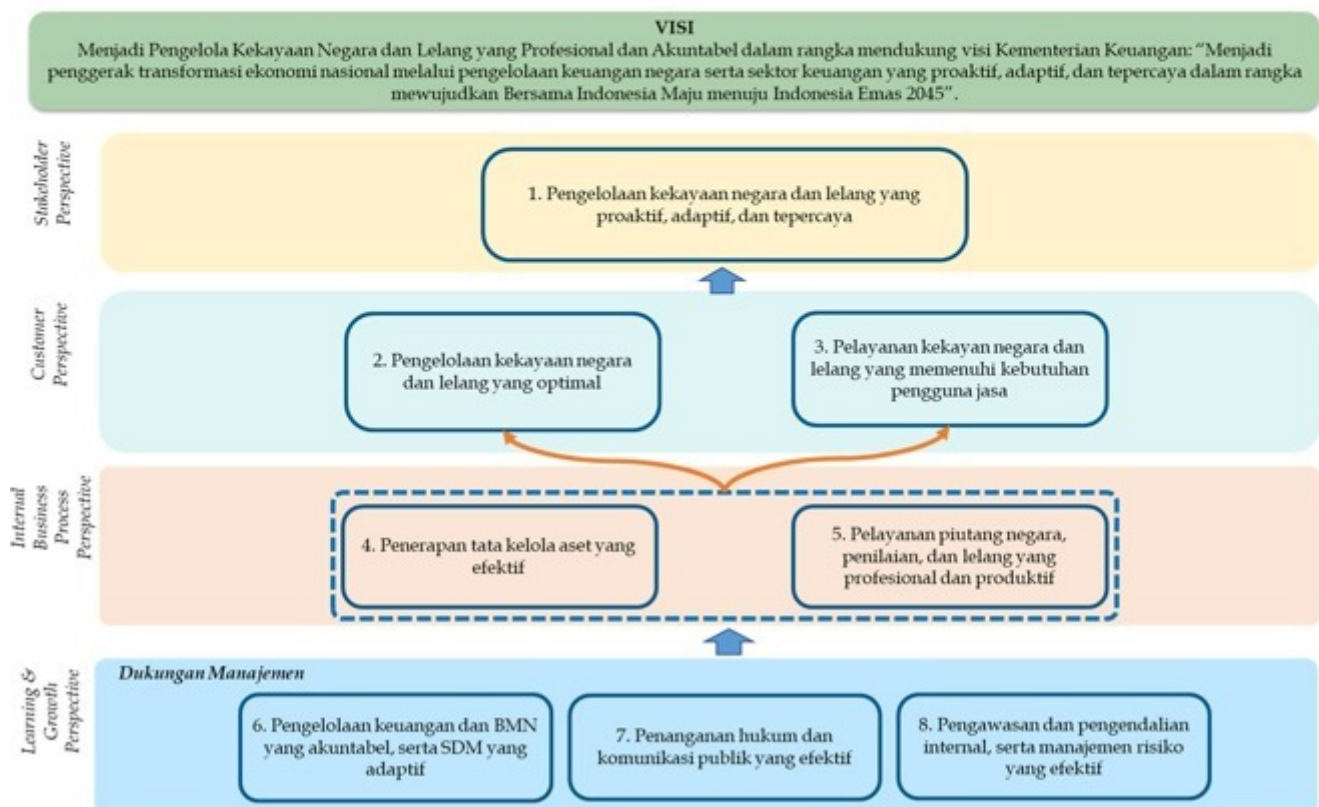
**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-02/WKN.13/2025**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SAMARINDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Peta Strategi**



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SAMARINDA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp25,3 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp315,7 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp541 Jt)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7c-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80

**Program/Kegiatan 2025**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

**Anggaran**

Rp387,870,000



1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp32,623,000
2. Pengelolaan Aset	Rp355,247,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp1,739,539,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp19,571,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp1,664,816,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp27,792,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Rp27,360,000

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan  
Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bagus Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SAMARINDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya</b>							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,3 M)
<b>2</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal</b>							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp315,7 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp541 Jt)
<b>3</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa</b>							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
<b>6</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif</b>							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	anggaran							
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7c-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bagus Kurniawan



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1		Perluasan basis lelang sukarela melalui ekstensifikasi objek lelang hak menikmati dan permohonan lelang dari pelaku usaha	1. Jumlah pelaksanaan lelang hak menikmati 2. Jumlah pelaksanaan dan hasil lelang sukarela dari pelaku usaha	Januari - Maret	Pemetaan potensi, audiensi/sosialisasi dan asistensi	Daftar potensi lelang	Q1 s.d. Q4	1. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda	0
				April - Juni	Pemetaan potensi, audiensi/sosialisasi dan asistensi	Daftar potensi lelang			
					Pelaksanaan lelang	Surat penetapan jadwal lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati:			
				Juli - September					
				Oktober - Desember		Surat penetapan			



						jadwal lelang/tindak lanjut surat permohonan lelang hak menikmati: Minuta Risalah Lelang			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bagus Kurniawan



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bagus Kurniawan		NAMA	Jose Arif Lukito
NIP	19820821 200312 1 002		NIP	19710912 199603 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp25,3 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp315,7 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp541 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayan negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito  
19710912 199603 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan  
19820821 200312 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	28 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,3 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp315,7 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp541 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7c-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80

#### KONSEKUENSI

*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*



Kota Samarinda, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

19710912 199603 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan

19820821 200312 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025*



## ALIGNMENT RENSTRA RENJA DAN KK

### ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA KPKNL SAMARINDA TAHUN 2025

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025		Rencana Kerja Kementerian Keuangan (DJKN) Tahun 2025		Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Target Kinerja pada PK KPKNL Samarinda	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas Organisasi	100	Indeks integritas	100
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (25.3M)
3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	100%
4	Persentase realisasi pokok lelang	100	Persentase realisasi pokok lelang	100%	-	-	Persentase realisasi pokok lelang	100% (315M)
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	-	-	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (1M)
6	-	-	-	-	-	-	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74

## ALIGNMENT RENSTRA RENJA DAN KK

### ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA KPKNL SAMARINDA TAHUN 2025

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025		Rencana Kerja Kementerian Keuangan (DJKN) Tahun 2025		Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Target Kinerja pada PK KPKNL Samarinda	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20 (Skala 5)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20 (Skala 5)	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan	100	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	100%	-	-	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
9	-	-	-	-	-	-	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
10	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	-	-	-	-	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (15 berkas)
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	-	-	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
12	Persentase produktivitas lelang	80	-	-	-	-	Persentase produktivitas lelang	80%

## ALIGNMENT RENSTRA RENJA DAN KK

### ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA KPKNL SAMARINDA TAHUN 2025

No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025		Rencana Kerja Kementerian Keuangan (DJKN) Tahun 2025		Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Target Kinerja pada PK KPKNL Samarinda	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
13	-	-	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan	100	-	-	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
14	-	-	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	-	-	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
15	-	-	-		-	-	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
16	-	-	-	100	-	-	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	-	-	-	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

# FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi : KPKNL Samarinda  
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Nilai Kinerja
1	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif, Dan Terpercaya	Indeks Integritas	100	94,12	105,32	105,32
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang	100%	92,95%	92,95	92,95
2	Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Optimal	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	101,75%	101,75	101,75
		Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	71,65%	71,65	71,65
		Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%	136,26%	136,26	120
3	Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	77	95,70	124,29	120
		Indeks Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi	74	102,31	138,26	120
4	Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif	Persentase BMN Berupa Tanah Yang Disertipikatkan	100%	105,92%	105,92	105,92
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	111,71%	111,71	111,71
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, Dan Lelang Yang Profesional Dan Produktif	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	120,67%	120,67	120
		Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	111,32%	159,03	120
		Persentase Produktivitas Lelang	80%	86,71%	108,39	108,39
6	Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Akuntabel, Serta SDM Yang Adaptif	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120	120
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa	100	120	120	120
		Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	97,20%	121,50	120
7	Penanganan Hukum Dan Komunikasi Publik Yang Efektif	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100	118,09	118,09	118,09
		Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	114,25	142,81	120
8	Pengawasan Dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko Yang Efektif	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Dan Risiko	80	97,29	121,61	120



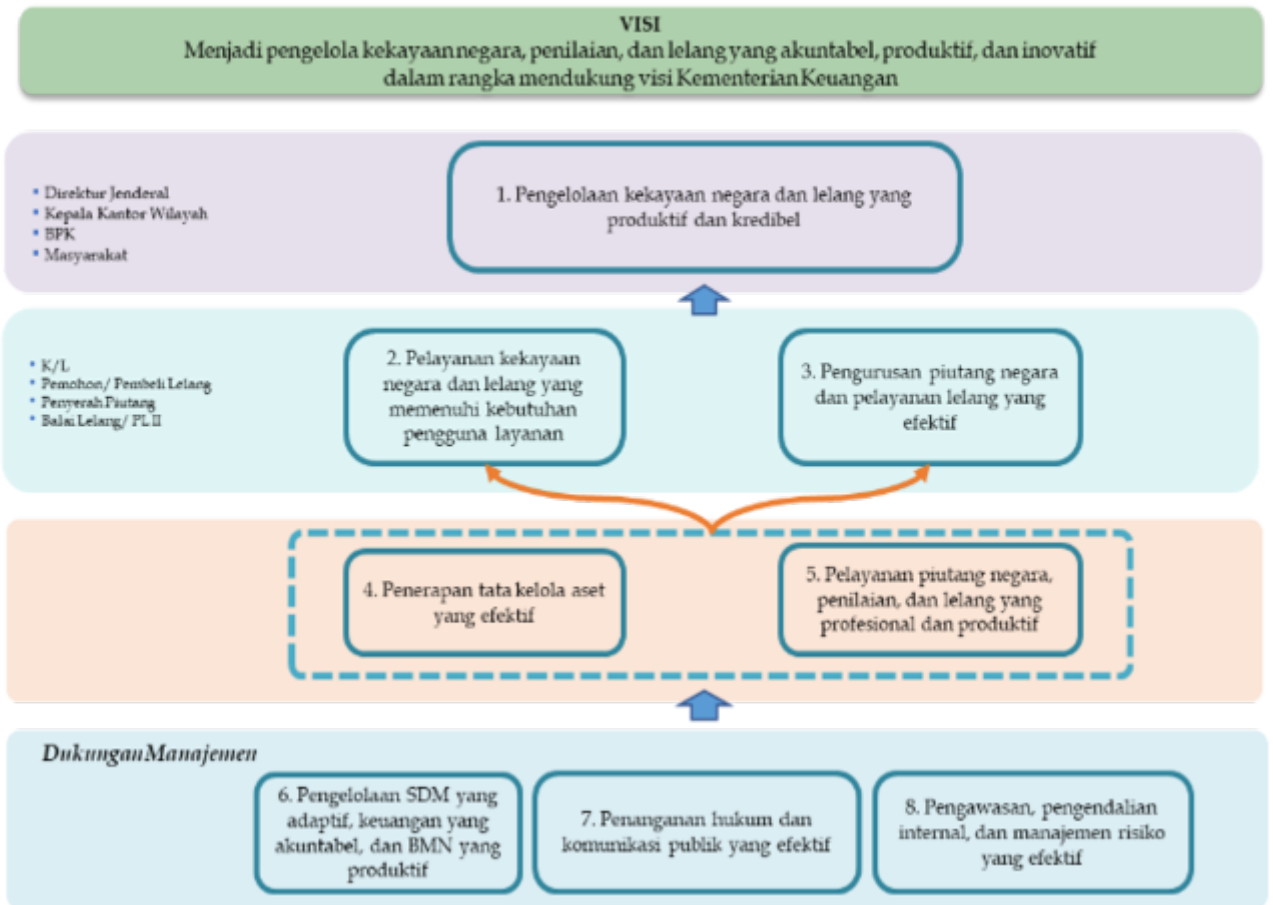
**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR: PK-02/WKN.13/2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SAMARINDA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2026**

**Pernyataan Kesanggupan**

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala KPKNL Samarinda, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2026  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG  
SAMARINDA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp20,98 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,2 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp108,51 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

**Program/Kegiatan 2026**

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

**Anggaran**

Rp568,627,000



Kegiatan

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp94,848,000  |
| 2. Pengelolaan Aset                       | Rp473,779,000 |

Program:

Dukungan Manajemen	Rp1,628,458,000
--------------------	-----------------

Kegiatan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi                                    | Rp20,492,000    |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                       | Rp1,542,864,000 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik               | Rp49,718,000    |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp15,384,000    |

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	Rp568,627,000
--	---------------

Kegiatan

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp94,848,000  |
| 2. Pengelolaan Aset                       | Rp473,779,000 |

Program:

Dukungan Manajemen	Rp1,628,458,000
--------------------	-----------------

Kegiatan

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi                                    | Rp20,492,000    |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum                       | Rp1,542,864,000 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik               | Rp49,718,000    |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp15,384,000    |

Samarinda, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan  
Utara



Ditandatangani Secara Elektronik  
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bagus Kurniawan



**RINCIAN TARGET KINERJA**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**  
**SAMARINDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>1</b>	<b>Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel</b>							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp20,98 M)
<b>2</b>	<b>Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan</b>							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<b>3</b>	<b>Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif</b>							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,2 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp108,51 M)
<b>4</b>	<b>Penerapan tata kelola aset yang efektif</b>							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
<b>5</b>	<b>Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif</b>							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
<b>6</b>	<b>Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif</b>							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
<b>7</b>	<b>Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif</b>							
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
<b>8</b>	<b>Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif</b>							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Samarinda, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan  
Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
Bagus Kurniawan



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2026**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Persiapan Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN Tahun 2027	Hasil inventarisasi aset yang akan diberdayakan/di manfaatkan	Januari - Desember	Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/di manfaatkan	Hasil inventarisasi aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1-Q4	1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	0

Samarinda, Januari 2026

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda



Ditandatangani Secara Elektronik  
 Bagus Kurniawan



**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Bagus Kurniawan		NAMA	Jose Arif Lukito
NIP	19820821 200312 1 002		NIP	19710912 199603 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina (IV/a)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp20,98 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp1,2 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp108,51 M)	Penerima Layanan

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran

**B. TAMBAHAN**



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> <li>-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara</li> <li>-Menjaga rahasia jabatan dan negara</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan</li> <li>-Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas</li> <li>-Bertindak proaktif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>-Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Samarinda, Januari 2026

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan

19820821 200312 1 002



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

19710912 199603 1 001

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	29 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp20,98 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp1,2 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp108,51 M)

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
<b>KONSEKUENSI</b>								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								
<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Samarinda, Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

19710912 199603 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Bagus Kurniawan

19820821 200312 1 002

*Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026*



